

## INTISARI

Salah satu BMN yang dinilai nilai wajarnya oleh Seksi Pelayanan Penilaian adalah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, khususnya buku. Dalam kenyataannya banyak Instansi pemerintah yang kurang tepat dalam menilai nilai wajar buku yang mereka miliki. Hampir semua buku yang mereka miliki dicatat dengan nilai wajar sebesar Rp1. Hal itu menyebabkan adanya opini tidak wajar dalam pelaporan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Karena adanya hal itu, maka banyak Instansi Pemerintah meminta KPKNL Yogyakarta khususnya bagian Seksi Pelayanan Penilaian untuk menilai berapa sesungguhnya nilai wajar buku yang mereka miliki. Dalam proses Penilaian nilai wajar buku, KPKNL Yogyakarta menggunakan berbagai macam metode dalam menentukan berapa nilai wajar sesungguhnya. Namun karena adanya batasan waktu dalam menilai nilai wajar aset tersebut, KPKNL Yogyakarta harus bekerja giat agar proses Penilaian dapat selesai dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan menurut *Standard Operating Procedures* (SOP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Penilaian nilai wajar buku oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta,

Subjek penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Objek kajian penelitian ini adalah analisis penilaian barang milik negara berupa buku dengan pendekatan biaya Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Teknik analisis data dengan mem-bandingkan pelaksanaan di lapangan dengan yang ada di SOP yang berlaku.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa KPKNL Yogyakarta telah melakukan proses penilaian dengan baik sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada. Lama dan panjangnya proses penilaian dikarenakan persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Pendekatan Biaya di anggap paling baik dalam menghitung nilai wajar buku.

***Kata kunci: Proses Penilaian, Laporan Penilaian, Nilai Wajar, Barang Milik Negara, Pendekatan Biaya, Standard Operating Procedures***

## **ABSTRACT**

*One of assessed state-owned goods by Service Assessment Commission is stated-owned goods besides land and/or properties, notably books. In fact, many of government agencies don not assess their fair value books. Most of all their books are recorded in fair value Rp 1. Hence, it causes inappropriate opinion in reporting financial statements which is issued by Badan Pengawas Keuangan (BPK). Therefore, most of Government Agencies ask KPKNL Yogyakarta, especially in Service Assessment Commission, to assess the real number of the fair value in their books. In the process of assessing fair value book, KPKNL Yogyakarta uses various methods in determining the real number of the fair value. Due to the time limitation in assessing fair value of the assets, KPKNL Yogyakarta should work actively, thus the assessment process could be completed timely based on SOP. This research aims to know the fair value assessment process of the book by KPKNL Yogyakarta*

*The subject of this research locates in KPKNL Yogyakarta. The object of this research is analysis the assessment of cost approach state-owned goods by KPKNL Yogyakarta. Technique of this data analysis compares the implementation in field work and implementation in SOP.*

*According to the result of this study, it concluded that KPKNL Yogyakarta have applied the assessment process very well based on SOP and regulations. Spending a much time in assessment process is caused by the requirements of completing the documents. Cost Approach is considering the best way in counting the fair value book.*

**Keywords:** *Assessment Process, the Assessment Report, the Value of State-Owned Goods, Reasonable, Cost Approach, Standard Operating Procedures*